

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu di era globalisasi saat ini sangat maju, hal ini memungkinkan memacu perkembangan teknologi yang sangat pesat terutama teknologi peralatan komputer dan teknologi peralatan komunikasi. Hal ini telah membawa manusia ke dalam era informasi yang mengalir tiada batas.

Pemanfaatan teknologi informasi di era sekarang ini merupakan suatu keharusan yang diterapkan di berbagai bidang baik di sektor bisnis maupun sektor pemerintahan. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi di dalam kegiatan pemerintahan tidak dapat dihindarkan. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah yang menuntut setiap daerah akan tuntutan produktivitas kerja karena sumber-sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus difungsikan secara efektif agar memperoleh hasil yang lebih baik. Selain itu, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang efektif dan efisien sudah merupakan tuntutan dewasa ini, terlebih-lebih apabila disimak pendapat Amitai Etzioni (dalam Nainggolan, 1998: 6) dikemukakan sebagai berikut:

Manusia modern yang telah meningkat kecerdasan dan pengetahuan teknologinya, telah menempatkan rasionalitas efektifitas, dan efisiensi sebagai nilai moral yang tinggi. Dengan sistem nilai moral yang demikian itu, orang modern terus berusaha meningkatkan kemampuannya untuk dapat mencapai tujuannya atau memenuhi kebutuhannya secara lebih tepat sebagaimana yang dikehendaki dalam waktu yang lebih cepat dan dengan biaya yang lebih murah.

Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola sektor publik yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, bukan saja mampu memanfaatkan

teknologi tetapi juga mampu menghasilkannya untuk kepentingan kehidupan manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan komponen yang paling menentukan dalam setiap lembaga dan organisasi. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, tujuan lembaga dan organisasi itu tidak akan pernah tercapai dan tidak eksis.

Aparat pemerintahan yang berkualitas merupakan ujung tombak dari kemajuan suatu daerah. Namun selama ini banyak keluhan yang terdengar bahwa sumber daya manusia di sektor publik belum mampu mewujudkan produktivitas dan efisiensi yang tinggi. Bahkan menurut Teguh (2003: 203) “Sebagai abdi masyarakat seringkali pegawai sektor publik lebih berorientasi pada pimpinan. Bentuk pengabdian yang diberikan tidak kepada rakyat namun kepada pimpinan yang di atasnya”.

Aparat dinas kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu aparat yang memiliki peran bagi perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan lembaga tersebut merupakan lembaga yang mengelola administrasi kependudukan menghasilkan data dan informasi mengenai perkembangan penduduk. Dalam UU No. 23 Tahun 2006 dijelaskan bahwa:

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Namun pada lembaga pemerintah tersebut, pendaftaran kependudukan belum mendapat tempat yang layak karena kegiatannya lebih menitikberatkan pada pencatatan sipil. Menurut beberapa ahli dalam www.ganjarkurnia.unpad.ac.id berpendapat bahwa tidak mungkin merencanakan

dan mengelola negara dengan baik apabila administrasi kependudukannya berantakan. Data kependudukan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan; seperti untuk perhitungan *income per capita*, PDB, PDRB dan sebagainya pada umumnya bersifat agregatif. Selain itu, data kependudukan tersebut dapat mengetahui keberadaan penduduk dalam berbagai hal, terutama usia dan tempat tinggal, yang dalam konteks pemilu sangat penting di dalam mencatat para calon pemilih.

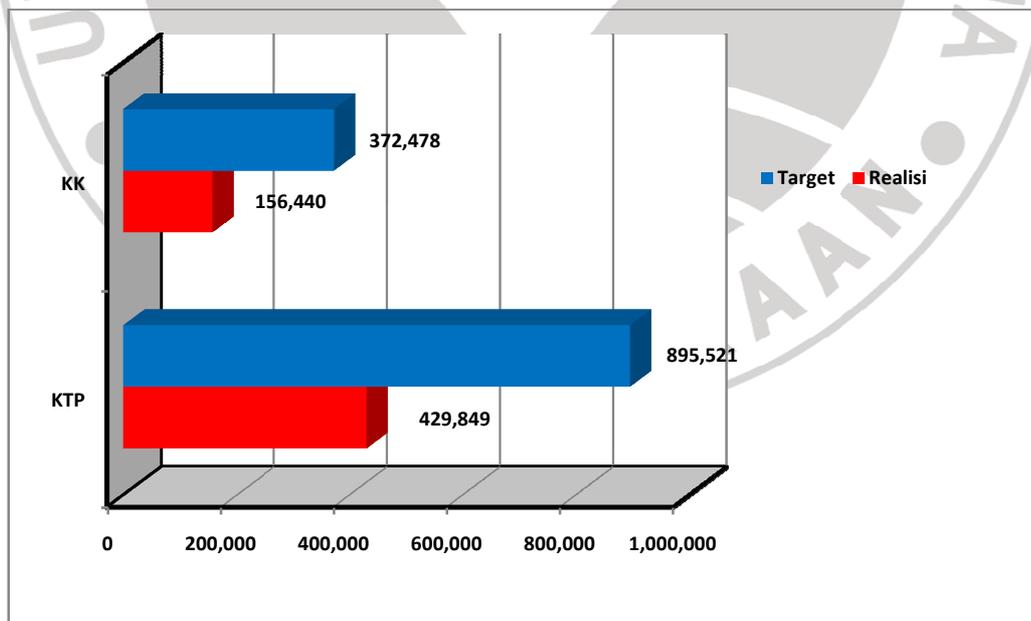
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka merupakan instansi pemerintah yang telah menerapkan teknologi informasi dalam mengelola administrasi kependudukan. Menurut hasil evaluasi komisi A DPRD Jawa Barat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Majalengka termasuk dalam tiga daerah dari 25 daerah di Jawa Barat yang telah efektif dalam penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan. Namun dalam kenyataannya masih adanya masalah dalam hal kualitas pelayanan dan kurang akuratnya mengenai data dan informasi kependudukan. Hal ini terlihat dari adanya masalah dalam penggunaan data kependudukan untuk kegiatan pemilihan umum kepala daerah Gubernur dan Bupati. Masalah yang terjadi ketika menggunakan data kependudukan sebagai dasar untuk penetapan calon pemilih. Selain banyak orang yang tidak terdaftar, kenyataan di lapangan banyak terjadi kesalahan, seperti kesalahan penulisan nama, jenis kelamin, didaftar lebih dari satu kali, dan perubahan yang tidak tercatat (meninggal, pindah).

Apabila dicermati lebih jauh, terjadinya masalah seperti tersebut di atas terkait erat dengan kurang tertatanya administrasi kependudukan. Kalaupun pendaftaran pemilih dengan sistem sensus, yaitu dengan mendaftarkan seluruh

penduduk yang memiliki usia hak pilih, dan akan memiliki usia hak pilih pada hari “H” pemilu, namun keabsahan dari usia dan tempat tinggal tetap harus kepada pendaftaran kependudukan (Kepmendagri No. 54 tahun 1999).

Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah rendahnya efektivitas organisasi dalam mengelola administrasi kependudukan dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan produktivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

Selain Permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, rendahnya efektivitas pegawai dinas kependudukan dapat dilihat dari hasil pendataan penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka selama tahun 2008 mengenai kepemilikan Kartu Tanda Kependudukan dan Kartu Keluarga di bawah ini:



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka

Gambar 1. 1
Data Kepemilikan Kartu Keluarga di Kab. Majalengka

Menurut Hj. Yeni K. S.Sos (kepala seksi administrasi pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka), target kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2008 sebesar 100 %. Namun, realisasinya pada kepemilikan KTP hanya 48 % sedangkan kepemilikan KK sebesar 42%. Dari data diatas terlihat masih banyaknya penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dan belum optimalnya sosialisasi dari aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Majalengka. Selain itu, adanya anggapan buruk dari masyarakat dengan pelayanan yang diberikan petugas pendaftaran kependudukan yang cenderung menyulitkan dan mengenai biaya yang tidak transparan.

Berbagai permasalahan mengenai data kependudukan yang kurang akurat dan pelayanan yang buruk berdasarkan pengamatan di lapangan disebabkan petugas di tempat perekaman data kependudukan atau registrar yang kurang andal, ditunjang juga dengan tingkat pendidikan yang masih rendah yaitu berijazah SMP dan SMA. Berdasarkan hasil evaluasi Badan Perencanaan Daerah Propinsi Jawa Barat tahun 2008 jumlah personil pada unit kerja yang menangani program adminstrasi kependudukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Personil pada Unit kerja yang Menangani Program Adminstrasi Kependudukan

Ijazah	Jumlah	Kabupaten/Kota
setingkat S I (terkecil)	4 orang	Kabupaten Tasikmalaya
setingkat S I (terbanyak)	42 orang	Kota Bandung

Non S I (terkecil)	5 orang	Kabupaten Kuningan
Non S I (terbanyak)	62 orang	Kabupaten Majalengka

Sumber: Bapeda Jawa Barat 2008

Hal ini sesuai dengan pernyataan GDE Kagung Putra selaku praktisi TI

dan staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar berpendapat bahwa:

Penggunaan sistem informasi dan database tidak menjamin dapat menyajikan data yang lengkap, karena sistem informasi adalah sebuah sarana atau “software”, yang jika tidak dikelola dan diberdayakan oleh SDM yang andal maka dia tidak akan dapat memberikan informasi yang akurat.

Berdasarkan pada masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian “Bagaimana penerapan, penggunaan, pengelolaan ataupun pengembangan teknologi sistem informasi kependudukan dalam pengelolaan administrasi kependudukan mempengaruhi tingkat produktivitas kerja bagian operator perekam data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka”.

Mengingat pentingnya penggunaan teknologi sistem informasi dalam pengelolaan administrasi kependudukan sehingga efektivitas kerja tercapai, yaitu dapat menimbulkan pelayanan yang maksimal, pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, maka penulis merasa tertarik untuk mencoba menelaah dan menganalisis bidang kajian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **”Pengaruh Penerapan Teknologi Sistem Informasi Kependudukan Terhadap Produktivitas Kerja Bagian Operator Perekam Data Pegawai Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Telah dijelaskan pada latar belakang masalah, bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah merupakan hal yang mutlak khususnya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka karena merupakan instansi yang dituntut akan produktivitas kerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori produktivitas menurut Gaffar (dalam Suwatno: 2005: 39) bahwa "Ada dua variabel utama yang sangat kontributif terhadap produktivitas, yaitu teknologi dan unjuk kerja".

Berdasarkan identifikasi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitiannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran penerapan teknologi sistem informasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.
2. Bagaimana gambaran mengenai tingkat produktivitas kerja pegawai bagian operator perekam data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.
3. Adakah pengaruh penerapan teknologi sistem informasi kependudukan terhadap tingkat produktivitas kerja pegawai bagian operator perekam data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan maksud untuk mengetahui pengaruh penerapan teknologi sistem informasi kependudukan terhadap produktivitas kerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan teknologi sistem informasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.
2. Untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat produktivitas kerja pegawai bagian operator perekam data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.
3. Mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan teknologi sistem informasi kependudukan terhadap tingkat produktivitas kerja pegawai bagian operator perekam data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam hasil penelitian ini penulis dapat menambah dan meningkatkan cakrawala berpikir dan wawasan tentang:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna memberi sumbangan untuk bidang penerapan teknologi sistem informasi di organisasi pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Kegunaan Praktis

Bagi kantor dijadikan bahan pertimbangan perlunya memperhatikan tingkat produktivitas kerja pegawai dengan penerapan teknologi sistem informasi.

3. Kegunaan Akademik

Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan bagi para peneliti yang akan menggunakan penelitian yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi dalam organisasi pemerintahan dan produktivitas kerja pegawai.

